

**KAJIAN HUKUM PEWARISAN HARTA BENDA
TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH KAWIN
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI**

Oleh
NYOMAN TRI ANTIKA DEWI. NIM 2014101096

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

ABSTRAK

Pewarisan bertujuan untuk memindahkan hak serta tanggungjawab terhadap sesuatu yang bersifat materi atau nonmateri dari satu pihak kepada pihak lainnya yang disebut ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan perempuan dalam hal pewarisan dari persepektif Hukum Adat Bali. (2) Untuk mengetahui akibat hukum atas penyerahan hak waris kepada perempuan yang sudah kawin dalam persepektif Hukum Adat di Bali. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Tehnik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan tehnik studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berdasarkan data yang dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar hukum. Dengan penelitian ini ditemukan hasil bahwa (1) masyarakat Bali Patriarki, sehingga kedudukan wanita tidak diutamakan untuk menjadi ahli waris (2) dengan adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/ Mdp Bali/ X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali, yang dimana hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, maka wanita yang telah kawin diberikan hak waris atas benda orangtuanya

Kata kunci: hukum pewarisan, harta benda, perempuan yang sudah kawin, perkawinan, hukum adat Bali.

**STUDY OF THE LEGAL INHERITANCE OF PROPERTY TO MARRIED
GIRLS IN THE BALI TRADITIONAL LEGAL SOCIETY**

By

NYOMAN TRI ANTIKA DEWI, NIM 2014101096

Department of Law and Citizenship

Ganesha University of Education

Singaraja, Indonesia

ABSTRACT

Inheritance aims to transfer rights and responsibilities for something material or non-material from one party to another party called the heir. This research aims to (1) determine the position of women in terms of inheritance from the perspective of Balinese Customary Law. (2) To determine the legal consequences of handing over inheritance rights to married women from the perspective of Customary Law in Bali. The type of research used is normative legal research, namely research based on statutory regulations. In this research, a statutory approach is used by examining statutory regulations related to research. The technique for collecting legal materials in this research is using document study techniques, namely by studying data collected from archival research or literature studies such as books, papers, articles, journals, newspapers or the works of legal experts. With this research, it was found that (1) Balinese society is patriarchal, so women are not prioritized in becoming heirs (2) with the Decree of the Main Council of Pakraman Village, Bali Province No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the inheritance of Balinese Hindu women, which has legal force, married women are given inheritance rights to their parents' property.

Key words: inheritance law, property, married woman, marriage, Balinese customary law.